

KEDUDUKAN BPSK DALAM MENJAMIN PRINSIP *ACCESS TO JUSTICE* BAGI KONSUMEN

Ni Luh Novi Astawati¹, Mochamad Cholil²

INTISARI

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lembaga baru dibentuk oleh pemerintah sebagai solusi sengketa konsumen yang cepat dan murah, namun kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia serta efektivitasnya dalam menjamin *access to justice* perlu dikaji. Penelitian ini akan menganalisis: (1) posisi hukum BPSK, dan (2) sejauh mana BPSK memenuhi Prinsip *access to justice* bagi konsumen. Dengan tujuan untuk mengetahui posisi hukum BPSK dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimana kontribusi BPSK dalam menjamin *access to justice* bagi konsumen dalam menangani perselisihan dengan pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum dengan dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dengan mengkombinasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang diterapkan adalah studi pustaka (*bibliography study*), dan analisis data memakai preskriptif. Hasil dari penelitian ini terkait kedudukan BPSK pada sistem peradilan Indonesia adalah di luar peradilan atau quasi-yudisial karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Keberadaan BPSK telah berperan penting dalam mengatasi ketidaksimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, dengan menerapkan tiga prinsip dasar yaitu aksesibilitas, *fairness*, dan efektivitas secara keseluruhan telah memenuhi prinsip *access to justice*. Namun implementasi masih menghadapi berbagai tantangan tidak meratanya BPSK di setiap daerah tingkat II (kota/kabupaten), rendahnya kesadaran konsumen.

Kata Kunci: *Access to Justice, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Konsumen*

1 Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

2 Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE ROLE OF BPSK IN ENSURING THE PRINCIPLE OF ACCESS TO JUSTICE FOR CONSUMERS

Ni Luh Novi Astawati¹, Mochamad Cholil²

ABSTRACT

The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is a new institution established by the government as a fast and cost-effective solution to consumer disputes. However, its position in the Indonesian judicial system and its effectiveness in ensuring access to justice require review. This research will analyze: (1) the legal position of BPSK, and (2) the extent to which BPSK meets the principle of access to justice for consumers. To know the legal position of BPSK in the Indonesian judicial system and how BPSK contributes to ensuring access to justice for consumers in handling disputes with business actors. The type of research used by the author is legal research with two approaches, namely: (1) statute approach, (2) conceptual approach. Using sources of secondary legal materials obtained indirectly through intermediary media by combining primary and secondary legal materials. The collection techniques applied are bibliography study, and data analysis using prescriptive methods. The results of this research related to BPSK's position in the Indonesian judicial system are outside the judiciary or judicial because BPSK's decision is final and binding, but does not have executive power. The existence of BPSK has played an important role in overcoming the imbalance of legal positions between consumers and business actors, by applying three basic principles, namely accessibility, fairness, and overall effectiveness, which have fulfilled the principle of access to justice. However, the implementation is still facing various challenges of BPSK's unevenness in each region II of the city/district, and low consumer awareness.

Keywords: *Access to Justice, Consumer Dispute Resolution Agency, Consumer*

¹ Student of Law Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta

² Lecture of the Law Study Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta